PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl.Raya Sernaru email : Kominfo@manggaraibaratkab.go.id/
dinkominfomabar@gmail.com
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

Labuan Bajo, 8 Januari 2024

Kepada
Yth. Bupati Manggarai Barat
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 500.12-1/Dinkominfo/I/2025

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Pengiriman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024	1 (satu) Jepit	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan terima kasih

Demikian untuk diketahui atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Manggarai Barat,

Paulus Setahu, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMDA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

kominfo@manggaraibaratkab.go.id
https://kominfo.manggaraibaratkab.go.id

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika
Unit OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
KOMUNIKASI	DINAS KOMUNKASI DAN INFORMATIKA		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Terealisasinya 9 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah antara lain DPA 2024, Renja Perubahan 2024, DPA Pergeseran 2024, Rencana Aksi, Cascading Kinerja, DPPA 2024, RKA Perubahan 2024, Renja 2025, RKA 2025	Tidak Ada	Tidak Ada
			b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya 7 Dokumen antara lain LKIP 2024, LPPD 2024, LKPJ 2024 dan Evaluasi Renja Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2024	Tidak Ada	Tidak Ada
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang selama 12 bulan	Terbayarnya gaji 25 orang ASN selama 12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada
			b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Bulanan Penyelesaian Pengajuan dan Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Daerah dan Belanja jasa tenaga administrasi (TKD)	Tidak Ada	Tidak Ada
			c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Dokumen	Tersedianya 18 Dokumen Laporan Keuangan 2024 berupa Laporan BO bulan Januari s/d Desember dan LRA Triwulan I s/d Triwulan IV	Tidak Ada	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
			a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Tersedianya 1 Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah PD berupa Laporan Akhir Hasil Rekon Aset Tetap dan Persediaan yang terdiri dari Rekapitulasi Aset, KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, Penyusutan dan Invetaris Extra	Tidak Ada	Tidak Ada
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang ASN yang memiliki sertifikat keahlian dibidang IT, Statistik dan Jurnalisme	Tersedianya ASN yang memiliki sertfikat keahlian di bidang IT sebanyak 10 ASN yang mendapatkan sertifikat keahlian yaitu 5 orang di bidang Statistik dan 5 Orang di bidang Jurnalisme	Ketersediaan Bimtek yang sangat minim serta kuota peserta yang terbatas	ASN PD perlu melakukan pendaftaran Bimtek lebih awal
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Tersedianya 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terdiri dari pembelian alat-alat listrik selama 12 Bulan	Tidak Ada	Tidak Ada
			b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya 1 paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis kantor selama 12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket (310 Kotak)	Tersedianya makanan dan Minuman Rapat yang diselenggarakan selama 1 Tahun rapat Staf Awal Bulan dan Rapat Evaluasi Akhir Bulan degnan rincian 290 kotak sncak dan 270 kotak nasi	Tidak Ada	Tidak Ada
			d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket (12 bulan)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Selama 1 Tahun seperti Cetak Lembar Disposisi, Penggandaan dan Jilid Dokumen-dokumen Perda, Perbup, RKA, DPA, DPPA, Renstra, Lakip dan SPJ Pengeluaran selama 12 Bulan	Tidak Ada	Tidak Ada
			e) Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	Tersedianya 1 paket penyediaan bahan/material berupa alat-alat kebersihan kantor selama 12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada
			f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Terselenggaran Rapat-rapat koordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa rapat Koordinasi Kominfo se prov NTT, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Smartcity, Rapat Koordinasi Kolaobarasi Smart Ciry, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Rapat Koordinasi dan evaluasi pemanfaatan Akses Intenet, BTS dan Ekosistem TIK	Tidak Ada	Tidak Ada
			g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Tersedianya 1 dokumen penatausahaan arsip Perangkat Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Tersedianya 1 laporan jasa surat menyurat berupa laporan belanja materai dan jasa pengiriman surat selama 12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada
			b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	Tersedianya 1 laporan Penyediaan jasa Sumber Daya Air dan listrik berupa Laporan Pembayaran tagihan air dan pembelian pulsa listrik selama 12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit Kendaraan	Terpeliharanya 12 Unit Kendaraan yang terdiri dari 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 11 Unit Kendaraan Roda Dua Selama 12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada
			b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	Terpeliharanya 10 unit Laptop, 5 unit AC, 8 unit Printer dan 4 unit Komputer Selama 12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	Tersedianya 1 Dokumen Monitoring dan Aspirasi Publik berupa dokumen pemberitaan pembangunan di Kab. Manggarai Barat	Tidak Ada	Tidak Ada
			b) Pengelolaan Konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Tersedianya 1 Dokumen Pengelolaan Konten media sosial pemda (Facebook, Instagram dan Youtube) dan perencanaan media komunikasi publik	Sarana dan prasarana kurang memadai untuk pengolahan video dan gambar untuk konten media sosial Pemda	Menyediakan sarana dan prasarana komputer serta peralatan pendukungnya (Laptop dengan kualifikasi khusus, hardisk eksternal dan kamera berkualitas tinggi)
			c) Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Sub kegiatan ini tidak dapat dijalankan karena adanya refocusing anggaran	Tidak Ada	Tidak Ada
			d) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 dokumen	Tersedianya 1 dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pemberdayaan mitra Pemda berupa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kurang maksimal dalam mendiseminasikan informasi di daerah pedesaan	Pelaksanaan Bimtek dalam rangka Peningkatan pengetahuan anggota KIM dalam mendiseminasikan informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
			1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			a) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Tersedianya 1 dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan SDM yang memiliki Kualifikasi untuk pengelolaan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih sangat terbatas	Perlu pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualifikasi SDM
			b) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	1 unit	Terkelolanya 1 VDC Kabupaten Manggarai Barat pada Pusat Data Nasional (PDN) dan terkelolanya 10 VM	Tidak Ada	Tidak Ada
			c) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen	Tersedianya 1 dokumen Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada
			d) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	5 aplikasi	Terealisasinya 5 aplikasi Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu tte, e-signpro, datadinkes, transparansi, SIA (Sistem Informasi Arsitektur SPBE) dan SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Tidak Ada	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			e) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 dokumen	Tersedianya 1 dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Indek Smart City Kab. Manggarai Barat masih rendaha	- Perlu personel yang cukup dalam koordinasi pengumpulan data penyelenggaraan smart city pada masing-masing PD - Perlu peningkatan peran dewan smart city Mabar dalam mendorong implemetasi smart city di Kab. Mabar
			f) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 dokumen	Sub kegiatan ini tidak dapat dijalankan karena adanya refocusing anggaran	Tidak Ada	Tidak Ada

Labuan Bajo, Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat,

Paulus Setahu, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
STATISTIK	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAN**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				
			1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
			a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	Tersedianya 2 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yaitu Manggarai barat Dalam Angka dan Statistik Sektoral	- Penyediaan SDM pengelola data pada masing-masing PD masih sangat terbatas - Kurangnya Sinkronisasi jenis data yang sama antar Instansi PD - Ketersediaan Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data yang sangat minim	- Masing - masing PD harus menyediakan/menugaskan satu orang staf khusus yang menangani pengelolaan data - Untuk PD yang mengumpulkan jenis data yang sama harus dilakukan sinkronisasi agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap data - Perlu pengadaan Laptop atau komputer dengan spesikasi khusus untuk pengolahan data
			b) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5 Orang	Terealisasinya Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi untuk 7 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			c) Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Terealisasinya 4 metadata dari 4 Perangkat Daerah	Admin data pada masing-masing PD masih belum memahami lebih mendalam tentang penyusunan metadata pada data statistik sektoral pada masing-masing PD	Perlu mengadakan pelatihan atau bimtek yang maksimal dengan menghadir narasumber yang kompeten tentang pengelolaan metadata

Labuan Bajo, Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat,

Paulus Setahu, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PERSANDIAN	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAN**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				
			1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			a) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 OPD	Terealisasinya layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk 41 OPD	Tidak Ada	Tidak Ada

Labuan Bajo, Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat,

Paulus Setahu, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran IV
Nomor : 500.12-56/Dinkominfo/II/2025
Perihal : Pengiriman LKPJ Tahun TA 2024
Tanggal : Februari 2025

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No.	Kebijakan Strategis Urusan Persandian	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	*2*	*3*	*4*
1	Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Pembuatan PKS)	Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tetang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
2	Indeks KAMI (Keamanan Informasi	Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO / IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi	Mengetahui Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat

Paulus Setahu, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.196806292000121004

Catatan :
Bab II Pasal 2 Perbup Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan Pemerintahan bidang Statistik.

Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menadatangani MoU bersama BSRE dan telah mendapatkan persetujuan untuk Sistem Elektronik V Tax.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Nomor : 500.12-58/Dinkominfo/II/2025
Perihal : Pengiriman LKPJ Tahun TA 2024
Tanggal : Februari 2025

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realiasai Anggaran	%	Realiasai Capaian Kegiatan	%	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2											

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat

Paulus Setahu, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran V
Nomor : 500.12-59/Dinkominfo/II/2025
Perihal : Pengiriman LKPJ Tahun TA 2024
Tanggal : Februari 2025

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

No.	Rekomendasai DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	-	-	-

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat

Paulus Setahu, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara